

DISORGANISASI SOSIAL TENAGA KERJA VIETNAM DI JEPANG

Jurnal Analisa Sosiologi

Juli 2023, 12 (3): 528- 552

Ichlasul Ayyub¹

Abstract

Japan is one of the most powerful economies in the world. A high economy makes the lives of Japanese residents happier, the proof that crime cases in Japan is low. Crime's can be caused by various factors and can be committed by anyone, indigenous people, or immigrants. Japan, which incidentally has a good economy condition, will certainly attract people from all over the world to come to Japan, as workers, students, or as tourists. From that many immigrants, not all of them obey the rules in Japan, few of them commit crimes. Immigrants who commit crimes come from various countries, but the most significant are immigrants from Vietnam. The number of Vietnamese immigrants who commit crimes in Japan is relatively increasing every year. The purpose of this study is to analyze the phenomenon of increasing crime committed by Vietnamese immigrants using the perspective of social disorganization and the concept of poverty, a concept from Anthony Giddens. This research is a qualitative descriptive research using literature study method. The results of the analysis show that the unstable economy in the country of origin and the large number of Japanese companies investing in Vietnam have made many parents send their children to work in Japan. Sometimes because of the strong desire of parents who are not balanced with the mental maturity of the child. Mental instability triggers people to do things that are forbidden. Differences in norms, economics, and high socio-cultural differences between Vietnam and Japan also led to social disorganization.

Keywords: *Vietnamese Crime; Japan; Social Disorganization; The Concept of Poverty*

Abstrak

Jepang adalah salah satu negara dengan perekonomian yang kuat di dunia. Perekonomian yang tinggi membuat kehidupan penduduk Jepang lebih bahagia, ini terbukti dengan jumlah kasus kejahatan di Jepang yang rendah. Kasus kejahatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor dan bisa dilakukan oleh siapa saja, warga pribumi, maupun warga pendatang. Jepang yang notabene memiliki kondisi perekonomian yang bagus tentu akan menarik minat warga dari berbagai penjuru dunia untuk datang ke Jepang, sebagai pekerja, pelajar, maupun sebagai wisatawan. Dari sekian banyak pendatang tersebut tidak semuanya mematuhi peraturan yang ada di Jepang, beberapa dari mereka ada yang melakukan kejahatan. Pendatang yang melakukan kejahatan berasal dari berbagai negara, namun yang paling signifikan adalah pendatang dari Vietnam. Jumlah pendatang Vietnam yang melakukan kejahatan di Jepang semakin meningkat setiap tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa fenomena meningkatnya kriminalitas yang dilakukan oleh pendatang Vietnam menggunakan perspektif disorganisasi sosial dan konsep *poverty* atau kemiskinan, suatu konsep dari Anthony Giddens. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa perekonomian yang tidak stabil di negara asal dan banyaknya perusahaan Jepang yang berinvestasi di

¹ Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang FIB Universitas Diponegoro

¹ Correspondence email: ichlasulayyub@lecturer.undip.ac.id

Vietnam membuat banyak orang tua menyuruh anaknya bekerja di Jepang. Kadang karena keinginan keras dari orang tua yang tidak diimbangi dengan kematangan mental anak. Mental yang tidak stabil memicu orang untuk melakukan hal yang dilarang. Perbedaan norma, ekonomi, dan sosial budaya yang tinggi antara Vietnam dan Jepang juga menyebabkan terjadinya disorganisasi sosial.

Kata Kunci: Kejahatan Orang Vietnam; Jepang; Disorganisasi Sosial, Konsep Kemiskinan

PENDAHULUAN

Jepang dilansir sebagai negara yang memiliki tingkat keamanan tinggi dan kasus kejahatan yang relatif rendah, dengan total 915.042 kasus pada tahun 2017, paling rendah selama 70 tahun terakhir, didapat dari data National Police Agency (Bloomberg, 2018). Walaupun begitu, kriminalitas tetap terjadi, bahkan tidak jarang warga asing yang menjadi korban. Di daerah-daerah seperti Roppongi, Shinjuku (Kabuki-cho), Shibuya, dan Ikebukuro. Kejahatan di area ini biasanya berhubungan dengan tempat-tempat hiburan malam dan panti pijat. Tempat-tempat tersebut menjadi panggung utama bagi sindikat kejahatan di Jepang (Yakuza) dan organisasi kejahatan lainnya (grup kriminal Afrika).

Jepang merupakan negara yang menjadi tujuan para pendatang dari berbagai negara dengan tujuan berbeda-beda. Pada tahun 2017 Jumlah pendatang terbanyak sebagai pekerja di Jepang 1,27 juta jiwa (TribunNews, 2018). Jumlah tersebut didominasi oleh tenaga kerja dari China sebanyak 372.000 orang. Disusul dengan tenaga kerja dari Asia Tenggara, termasuk salah satunya Vietnam. Dihitung berdasarkan status tinggal, Jumlah pelajar asing yang datang ke Jepang pada tahun 2017, sekitar 259.000 orang, 45.000 orang dengan visa Istri atau suami warga Jepang. Misalnya di kota Matsudo yang berada di Prefektur Chiba, sekitar 21 menit dari Stasiun Ueno, dihuni oleh 15.058 warga asing, termasuk komunitas Vietnam yang tengah berkembang. Menurut petugas pemerintahan, jumlah dari warga asing yang tinggal di Jepang pada tahun 2016 mencapai 2,47 juta, atau 1,95% dari total populasi Jepang. Kota dengan populasi warga negara asing tertinggi di Jepang adalah Yokohama, dengan 92.117 orang; Nagoya dengan 77.668 orang; Kobe dengan 46.831 orang; distrik Shinjuku Tokyo (43.354 orang); dan Kawasaki (38.651 orang).

Populasi ekspatriat Vietnam meningkat empat kali lipat dari tahun 2012 hingga 2016. Dan mencapai 232.562 pada Juni 2017. Data dari Pew Research Center di Amerika Serikat menunjukkan bahwa Jepang ada di antara sepuluh besar negara tujuan imigran Vietnam pada tahun 2017. Vietnam telah mengalahkan Brazil dan menjadi grup minoritas keempat di Jepang. The Japan Times memprediksi Vietnam akan segera mengalahkan Filipina dan menduduki peringkat ketiga. Jumlah total penduduk non-permanen dari Vietnam meningkat lebih dari enam kali lipat dari 2008 sampai 2017 (VnExpress, 2017).

Jumlah pelajar Vietnam di Jepang meningkat 12 kali lipat yaitu sekitar 54.000 orang, seperti yang dikutip Bloomberg (2018) dari Japan Student Services Organization (JASSO) pada laporan tahun lalu. Meningkatnya jumlah perusahaan Jepang di Vietnam menjadi faktor pendukung bagi pelajar dan orang tuanya untuk berfikir bahwa dengan sekolah di Jepang, mereka berharap akan mendapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi di perusahaan Jepang. Itsuro Tsutsumi, Direktur dari bagian pertukaran pelajar di JASSO menyatakan untuk Bloomberg (2018).

Fakta lain dari fenomena ini, sebagai minoritas, kejahatan yang dilakukan oleh pendatang Vietnam menduduki peringkat pertama. Bertanggung jawab atas 2.556 kasus kejahatan pada tahun 2015, melebihi kejahatan yang dilakukan oleh imigran China, yaitu sekitar 2.390. Perwakilan dari kepolisian di daerah Chubu menyatakan kepada Japan Times bahwa sekitar setengah dari peserta pelatihan dan pelajar dengan kewarganegaraan Vietnam tidak mampu untuk melunasi biaya sekolah dan terpaksa drop out dari sekolah dan berbalik ke dunia kejahatan.

Fenomena meningkatnya kriminalitas yang dilakukan oleh pendatang dari Vietnam, dapat dianalisis dengan fenomena migrasi. Migrasi adalah perubahan tempat tinggal yang dilakukan permanen (Lee dalam Mantra, 1985). Migrasi sering memunculkan berbagai konflik salah satunya budaya. Para imigran cenderung menemui konflik yang muncul dari pertentangan antara budaya asli mereka dengan budaya yang sedang berlaku di rumah baru mereka. Pada umumnya para imigran harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, apabila tidak maka akan timbul berbagai masalah dan para pendatang akan dilihat sebagai sumber masalah sosial di daerah

baru tempat mereka tinggal. Seiring dengan banyaknya masalah-masalah sosial seperti ini, para ahli sosiologi kemudian membentuk perspektif disorganisasi sosial. Perspektif ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial, sebuah kompleks dan dinamis dimana semua bagiannya dikoordinasikan. Jika ada sebuah kejadian yang merubah satu bagian pada sistem, maka akan ada penyesuaian di bagian lain. "Disorganisasi sosial" merujuk pada tidak adanya penyesuaian, atau kurangnya penyesuaian antar bagian.

Disorganisasi sosial adalah suatu gejala terlepasnya keterikatan tatanan sosial yang sebelumnya pernah melembaga dari seorang individu (Ruswanto, 2014). Disorganisasi sosial diartikan sebagai suatu kerusakan pada norma. Ada tiga tipe disorganisasi, yaitu *normlessness* (ketidak-bernormaan), *culture conflict* (konflik budaya), dan *breakdown* (kerusakan). *Normlessness*, tidak ada norma sebagai acuan bagaimana cara bertindak, karena norma lama dianggap tidak relevan, sementara norma baru belum ada. *Culture conflict*, ada setidaknya dua pasang norma yang berseberangan atau berlawanan mengenai bagaimana cara bertindak. Pada beberapa situasi, orang yang bertindak berdasarkan sebuah norma saja bisa menciderai norma lainnya. *Breakdown* adalah terdapat norma, tapi kesesuaian dengan mereka gagal menghasilkan keuntungan yang dijanjikan atau menghasilkan hukuman. Suatu kondisi dimana pelanggaran aturan dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan mengikuti aturan dianggap justru menghambat.

Akar penyebab disorganisasi sosial adalah, perubahan sosial. Seiring perubahan, bagian-bagian sistem sosial tidak selaras satu sama lain, hal ini bisa memunculkan konflik sosial. Bagian dari sistem sosial tidak pernah selaras sempurna. Namun demikian, biasanya ada kesetimbangan dinamis. Setiap kondisi yang mengganggu kesetimbangan dapat memicu disorganisasi sosial. Kondisi tersebut meliputi perubahan teknis, demografi, atau budaya yang menghasilkan perubahan sosial (yaitu, perubahan dalam hubungan sosial).

Perspektif disorganisasi sosial mempunyai konsekuensi untuk sebuah sistem dan orang-orang di dalamnya. Bagi masyarakat, disorganisasi sosial bisa mengakibatkan stres, yang pada gilirannya bisa menghasilkan "disorganisasi personal" misalnya, penyakit jiwa dan alkoholisme (Robert E.

L. Faris dan H. Warren Dunham, dalam Giddens, 2009). Untuk sistem, disorganisasi mempunyai tiga jenis konsekuensi. Pertama, dapat terjadi perubahan dalam sistem (beberapa respons atau adaptasi dapat membawa berbagai bagian sistem kembali menjadi seimbang). Kedua, sistem dapat berkontraksi untuk beroperasi dalam keadaan stabil (misalnya disorganisasi ada namun sistem tetap berfungsi). Ketiga, sistem kemungkinan rusak (yaitu, disorganisasi mungkin sangat mengganggu sehingga dapat menghancurkan sistem). Upaya untuk mengurangi disorganisasi sosial dapat diberlakukan setelah melakukan diagnosis yang tepat. Dengan demikian, bagian dari sistem yang berada di luar fase dapat dibawa kembali ke dalam stabilitas misalnya, perubahan teknis dapat diperlambat.

Perspektif disorganisasi sosial muncul setelah perang dunia 1 akibat dari beberapa keadaan tertentu di masyarakat luas dan bidang sosiologi. Setelah perang dunia 1, migrasi, urbanisasi dan industrialisasi mulai terjadi di AS dan berkembang pesat. Saat itu terjadi, muncul banyak masalah sosial, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat dibedakan dalam dua pendekatan, yaitu *absolute poverty* dan *relative poverty*. Konsep *absolute poverty* didasarkan pada gagasan subsistensi atau kondisi dasar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan keberadaan sehat secara fisik. Berbeda dengan *relative poverty* yang memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda. Seiring berkembangnya masyarakat, pengertian *poverty* juga berubah. Jika di dalam suatu masyarakat lebih banyak orang kaya, standar kemiskinan juga relatif naik ke atas.

Poverty atau kemiskinan dapat dikelompokkan di bawah dua judul utama: teori yang melihat individu miskin bertanggung jawab atas kemiskinan mereka sendiri, dan teori-teori yang memandang kemiskinan sebagai sesuatu diproduksi dan direproduksi oleh kekuatan struktural dalam masyarakat. Sosiolog Amerika bernama Charles Murray (dalam Giddens, 2009), bahwa ada individu kelas bawah harus bertanggung jawab secara pribadi atas kemiskinan mereka. Dengan hal ini, Murray mengacu kepada orang miskin yang bergantung kepada penyediaan kesejahteraan pemerintah dibanding memasuki dan bersaing ke dalam pasar tenaga kerja. Pendekatan yang kedua lebih menjelaskan kepada proses sosial yang menciptakan suatu kondisi mengenai kemiskinan yang sulit diatasi oleh individu.

Menurut pandangan seperti itu, kekuatan struktural dalam masyarakat, faktor-faktor seperti kelas, jenis kelamin, etnis, posisi pekerjaan, pencapaian pendidikan dan sebagainya, membentuk cara tersendiri di mana sumber daya disebarkan. Menjadi miskin tidak selalu berarti terperosok dalam kemiskinan. Sebagian besar orang yang hidup dalam kemiskinan pada waktu kapan pun telah menikmati kondisi kehidupan yang superior sebelumnya atau dapat diharapkan untuk keluar dari kemiskinan pada suatu saat di masa depan. Sosiolog Amerika bernama Charles Murray (dalam Giddens, 2009) berpendapat bahwa ada kelas bawah individu yang harus mengambil tanggung jawab pribadi atas kemiskinan mereka. Kelompok ini membentuk bagian dari budaya ketergantungan. Dengan kalimat tersebut, Murray mengacu bahwa orang-orang miskin lebih bergantung pada tunjangan kesejahteraan daripada bersaing di pasar tenaga kerja. Murray berpendapat bahwa pertumbuhan kesejahteraan suatu negara telah membentuk subkultur yang merongrong ambisi pribadi dan kemampuan untuk menolong diri sendiri. Daripada mencari ke masa depan dan berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, tergantung pada kesejahteraan dengan puas menerima bantuan.

Pandangan kemiskinan yang dipegang secara luas adalah bahwa kemiskinan adalah kondisi permanen. Namun menjadi miskin tidak selalu berarti terperosok dalam kemiskinan. Penelitian baru-baru ini telah mengungkapkan sejumlah besar mobilitas masuk dan keluar dari kemiskinan: sejumlah orang secara mengejutkan telah berhasil menghindari kemiskinan, dan pada saat yang sama jumlah yang lebih besar dari yang sebelumnya disadari hidup dalam kemiskinan di beberapa titik selama hidup mereka. Bagaimanapun banyak keluarga yang keluar dari kemiskinan juga memiliki resiko yang tinggi untuk masuk kembali ke dalam kemiskinan di kemudian hari selama proses perubahan periode ekonomi. Temuan-temuan ini telah mengarah pada pemahaman baru tentang pola kemiskinan yang cukup cair, yang juga telah ditemukan di masyarakat maju lainnya (Leisering and Leibfried, dalam Giddens, 2009). John Hills (1998) dalam Centre for Analysis of Social Exclusion telah menekankan menolak menerima 'lottery model' sebagai pandangan penentuan pendapatan. Dengan ini, dia menyatakan berarti bahwa kita harus skeptis terhadap

argumen yang menyajikan kemiskinan sebagai hasil 'satu kali' yang dialami oleh orang-orang secara lebih atau kurang secara acak ketika mereka bergerak melalui hierarki pendapatan. Pandangan ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan antara orang kaya dan miskin dalam masyarakat tidak terlalu penting; setiap orang memiliki peluang untuk menjadi pemenang atau pecundang di beberapa titik, sehingga gagasan kemiskinan tidak lagi menjadi penyebab keprihatinan serius.

Hal ini juga terjadi di Jepang, dimana banyak warga asing yang melakukan kejahatan karena menemui berbagai masalah yang disebabkan adanya perbedaan kehidupan di negara asal mereka dengan Jepang. Pemandang Vietnam yang merupakan pelajar dan peserta pelatihan, dibiayai oleh orang tua mereka untuk menimba ilmu dan mencari nafkah di Jepang. Harapan orang tua mereka adalah agar sang anak kelak mendapat pekerjaan yang baik di Vietnam seiring dengan berkembangnya perusahaan Jepang yang berinvestasi di Vietnam. Namun dalam proses mencapai apa yang diharapkan sebagai bentuk keamanan, mereka dihadapkan dengan berbagai tantangan termasuk masalah ekonomi. Ketika dihadapkan dengan masalah ekonomi, mereka akan mencoba untuk mencari jalan pintas untuk keluar dari masalah mereka. Beberapa dari mereka, menggunakan berbagai tindak kriminal sebagai jalan pintas. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan menganalisa fenomena meningkatnya kriminalitas yang dilakukan oleh pendatang Vietnam menggunakan perspektif disorganisasi sosial dari Earl Rubington dan Martin S. Weinberg. Meningkatnya populasi pendatang di suatu Negara tentu memiliki faktor pendorong dan penarik. Apa yang menyebabkan para pendatang ke negara lain untuk bekerja dan belajar menurut penulis disebabkan juga oleh faktor ekonomi di negara asal dan keinginan untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Penulis juga akan menganalisa bagaimana kasus kriminal yang dilakukan oleh pendatang Vietnam di Jepang bisa terjadi. Untuk mendukung analisa tersebut penulis menggunakan perspektif disorganisasi sosial, penulis juga akan menggunakan konsep *poverty* atau kemiskinan, suatu konsep dari Anthony Giddens.

Penelitian ini fokus pada fenomena meningkatnya jumlah kasus kejahatan di Jepang yang dilakukan oleh pendatang dari Vietnam. Penelitian

ini mengumpulkan data-data dan informasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema yang berdekatan, diantaranya yaitu penelitian dari Jung (2023), penelitian Jung ini mengkaji hubungan antara imigrasi dan kejahatan di Korea Selatan. Jung mengungkapkan bahwa ada keterkaitan antara peningkatan kasus kejahatan seiring dengan semakin banyaknya jumlah pendatang dari luar negeri (Jung, 2023: 10). Studi ini memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana penduduk asing memengaruhi kejahatan di Korea Selatan. Jumlah penangkapan juga meningkat seiring dengan insiden kejahatan, dan ada sedikit perubahan signifikan dalam rasio penangkapan terhadap kejahatan. Selain itu, peningkatan kejahatan sebagian besar termasuk dalam kategori kejahatan kekerasan daripada tindak pidana berat, kejahatan properti, dan kejahatan intelektual. Jung menyarankan agar pemerintah Korea perlu mempromosikan budaya multikultural dan akomodatif serta memungkinkan imigran untuk menetap secara stabil di masyarakat Korea. Rahman dkk (2012) melakukan penelitian terkait efek negatif dari pekerja asing di Malaysia. Dampak negatif utama yang ditimbulkan oleh tenaga kerja asing di Malaysia adalah “Ketergantungan yang berlebihan pada tenaga kerja asing”, “Meningkatnya kegiatan kriminal atau masalah sosial”, dan “Keberadaan tenaga kerja ilegal” (Rahman dkk, 2012: 1). Penelitian Rahman mengusulkan solusi untuk dampak negatif tersebut yaitu menarik pekerja lokal ke dalam industri konstruksi, sistem bangunan terindustrialisasi, menghilangkan migrasi ilegal, dan meningkatkan struktur tata kelola. Penelitian lain dilakukan oleh Leiva Dkk (2020) yang menganalisis hubungan antara imigrasi dan kejahatan melalui Model Durbin Spasial (SDM) yang dinamis. Penelitian Leiva ini dilakukan di negara dengan pendapatan rendah yaitu Chile. Hasil penelitian Leiva dkk menunjukkan bahwa tidak ada bukti statistik yang menghubungkan peningkatan jumlah imigran dengan peningkatan tingkat kejahatan jenis apa pun. Jika ada, hanya ditemukan hubungan negatif antara jumlah imigran dan kejahatan hanya untuk satu dari delapan jenis kejahatan yang dianalisis (2020:1). Hasil dari Leiva dkk (2020) dan Jung (2023) menunjukkan hasil yang cukup berbeda. Naoko (2020) melakukan penelitian berjudul “*Runaway and Resistance against and within Migration Infrastructures:*

The cases of Vietnamese migrant workers in Japan and Taiwan". Naoko menganalisis latar belakang pelarian, jaringan, dan lintasan pelarian dengan mengambil kasus pekerja migran Vietnam yang masuk ke Taiwan dan Jepang dari daerah pedesaan Vietnam dengan status kependudukan biasa. Naoko berfokus pada permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Vietnam di Taiwan dan Jepang, dan bagaimana cara mereka mengatasi permasalahan yang dihadapi di negara tujuan (Naoko, 2020:35). Belanger dkk pada tahun 2011 membuat penelitian yang membahas bagaimana program migrasi tenaga kerja sementara dapat memicu pekerjaan yang tidak teratur dan *overstay*. Kurangnya perlindungan bagi para migran, yang muncul dari praktik rekrutmen dan pekerjaan yang seringkali tidak etis, sangat membahayakan manfaat program bagi pekerja, pemberi kerja, dan negara tuan rumah. Untuk kasus migrasi tenaga kerja dari Vietnam ke Jepang, terlihat bagaimana migrasi tanpa izin secara struktural tertanam dalam dinamika transnasional dari proses perekrutan dan pekerjaan. Beberapa penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan tema yang saat ini penulis bahas. Penulis pada artikel ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana kemiskinan menjadi motivasi pendorong warga Vietnam untuk bekerja di Jepang, dan menjelaskan bagaimana fenomena meningkatnya kriminalitas yang dilakukan oleh pendatang Vietnam di Jepang memiliki keterkaitan dengan perbedaan norma, ekonomi, dan sosial budaya yang tinggi antara Vietnam dan Jepang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2017: 205) penelitian kualitatif diawali dari permasalahan yang remang-remang, tentatif bersifat sementara, dan dapat berkembang ketika peneliti telah terjun ke lapangan. Yang dimaksud dengan masalah yang berkembang adalah masalah tersebut bisa meluas maupun menjadi lebih fokus atau dalam, bahkan juga masalah dalam penelitian kualitatif dapat berubah total atau berganti. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori dari berbagai literatur (Andlini Dkk, 2021). Peneliti mengumpulkan data atau bahan

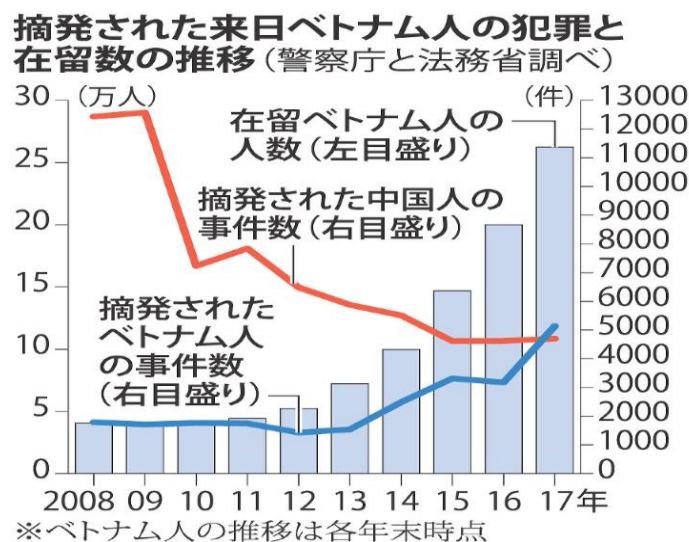
yang berkaitan dengan kasus kejahatan pendatang Vietnam di Jepang, dan apa saja faktor penyebabnya. Sumber-sumber yang digunakan berupa kumpulan artikel, buku, maupun laporan yang terkait kejahatan di Jepang yang dilakukan oleh pendatang dari Vietnam. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari faktor apa saja yang menyebabkan pendatang Vietnam di Jepang melakukan kejahatan atau tindakan kriminal. Untuk mengetahui faktor tersebut, penulis menggunakan pendekatan perspektif disorganisasi sosial, penulis juga akan menggunakan konsep *poverty* atau kemiskinan, suatu konsep dari Anthony Giddens. Penulis melakukan identifikasi sumber masalah terlebih dahulu dengan cara melihat kondisi pertumbuhan ekonomi di Vietnam, kemudian bagaimana daya Tarik Jepang untuk warga Vietnam, terakhir bagaimana perbedaan sosial budaya antara kedua negara tersebut bisa memicu pendatang Vietnam di Jepang untuk melakukan kejahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Vietnam di Jepang mengalami peningkatan pada tahun 2017. Kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Vietnam menduduki peringkat pertama dibanding warga negara asing lainnya untuk pertama kali pada tahun 2017. Secara nasional, polisi mencatat 5.140 kasus kejahatan dilakukan oleh pendatang Vietnam, meningkat dari total 3.177 kasus kejahatan dari tahun 2016, dan total persentase 30.2%. berdasarkan National Police Agency Data, peringkat pertama dahulu diduduki oleh China, yang pada tahun 2017 jumlahnya sekitar 4.071 kasus kriminal (Vnexpress, 2018).

Kasus kejahatan mencapai 260.000 seiring dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh ekspatriat dari Asia Tenggara. Penguntulan sekitar 2.037 kasus, pencurian melonjak hingga 325 kasus pada tahun 2017 dari hanya sekitar 12 kasus pada tahun sebelumnya (Mainichi, 2018).



Gambar 1: Kasus Kejahatan Oleh Pendatang Vietnam Pada Tahun 2008-2016

Sumber: <https://mainichi.jp/articles/20180412/dde/041/040/019000c>

Dari grafik tersebut terlihat bahwa kasus kejahatan yang dilakukan oleh pendatang Vietnam pada tahun 2008-2016 terjadi peningkatan yang relatif rendah. Kemudian di antara 10.700 kasus yang dilakukan oleh orang asing pada tahun 2017, 30% atau sekitar 5140 kasus dilakukan oleh pendatang dari Vietnam. Lebih banyak 439 kasus dibandingkan total kejahatan yang dilakukan oleh pendatang China pada tahun lalu yaitu tahun 2016.

Jumlah kejahatan yang dilakukan oleh penduduk asing nonpermanent, kecuali petugas militer U.S, mencapai 17.006 lebih dari 20,3% dari tahun sebelumnya. Brazil ada di peringkat ketiga dengan 1.058 kasus, disusul Korea Selatan dengan 1.038 kasus. Untuk jumlah warga asing di Jepang, pendatang dari China masih menduduki peringkat paling atas secara nasional, yaitu sekitar 3.159 orang. Disusul Vietnam dengan total 2.549 orang. Jumlah total pelaku kejahatan warga asing mencapai 10.828 orang, meningkat 7,1% dari tahun sebelumnya.

Fenomena melonjaknya kejahatan yang dilakukan oleh penduduk Vietnam pada tahun 2017 seiring dengan meningkatnya pendatang dari Vietnam di Jepang. Perbedaan standar ekonomi dan gaya hidup antara Vietnam dan Jepang yang berbeda, menyebabkan terjadinya berbagai

masalah. Salah satunya masalah ekonomi yang dapat menyebabkan munculnya kriminalitas. Kriminalitas yang dilakukan oleh pendatang Vietnam di Jepang meningkat tajam pada tahun 2017 hingga mencapai 30% atau 5.140 kasus. Penyebab dari meningkatnya kriminal yang dilakukan oleh pendatang Vietnam di Jepang dapat disebabkan dari faktor ekonomi dan perbedaan gaya hidup serta norma antara kehidupan di Vietnam dan Jepang. Populasi pendatang Vietnam di Jepang kebanyakan dibanjiri oleh para pelajar dan peserta pelatihan kerja atau pemagangan, namun karena perbedaan ekonomi dan gaya hidup menyebabkan terjadinya disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial akan membawa pendatang Vietnam tersebut melakukan tindak kriminalitas. Pada tahun 2018 ada sebanyak 5.140 kejahatan yang dilakukan oleh pendatang Vietnam, sebagian besar kejahatan didasari oleh faktor ekonomi. Para imigran dituntut untuk bisa beradaptasi dengan aturan dan gaya hidup masyarakat Jepang. Dalam kasus ini para imigran Vietnam tidak bisa beradaptasi dengan gaya hidup di Jepang yang berbeda jauh dengan di Vietnam. Kesulitan adaptasi ini memunculkan disorganisasi sosial.

Pembahasan

Pertumbuhan Ekonomi Vietnam

Perekenomian Vietnam sedang dalam masa transisi dari ekonomi terpusat yang direncanakan murni berdasarkan pertanian ke pasar ekonomi sosialis. Pada tahun 1986, Vietnam memulai reformasi ekonomi yang disebut “*Doi Moi*” yang membuka jalan bagi Vietnam. Reformasi ekonomi ini adalah rencana yang diarahkan pada pengembangan pasar multi-sektoral, mereformasi perbankan, hukum, fiskal dan moneter sistem, mengendalikan inflasi dan anggaran nasional; dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menarik investasi, khususnya investasi langsung dengan negara asing.

Vietnam telah mengalami perubahan demografis dan sosial yang cepat. Setelah bertahun-tahun pertumbuhan, penduduk Vietnam mencapai sekitar 95 juta jiwa pada tahun 2017 (naik sekitar 60 juta jiwa dari tahun 1986) dan diperkirakan akan terus meluas menjadi 120 juta jiwa hingga tahun 2050. Saat ini, 70% penduduk berusia di bawah 35 tahun, dengan

harapan hidup hampir 73 tahun. Ada kelas menengah yang muncul, saat ini mencakup 13% populasi, tetapi diperkirakan akan mencapai 26% pada tahun 2026.

Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya ekonomi di Vietnam adalah meningkatnya hubungan dagang Vietnam dengan mitra asing. Mitra utama Vietnam adalah Jepang, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea dan Uni Eropa, dan perdagangan dengan negara Asia merupakan 80% dari total keseluruhan perdagangan. Perusahaan Jepang menjadi investor terbesar bagi Vietnam di tahun 2017. Proyek terbesar adalah Marubeni, yang merupakan proyek pembangkit listrik batu bara yang bernilai \$ 2,79 miliar di Nghi Son, Provinsi Thanh Hoa. Pabrik batubara Sumitomo Corp senilai \$ 2,58 miliar di Khanh Hoa juga Mitsui Oil Exploration berpartisipasi dalam proyek pipa gas senilai \$ 1,27 miliar di Kien Giang. Keduanya berada di provinsi Vietnam Selatan (Tomiyama, 2017).

Setelah lebih dari 3 dekade, kemiskinan di Vietnam turun hingga 75%. Walaupun hal ini merupakan kesuksesan yang besar bagi Vietnam, masih ada beberapa masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). Perbedaan ras, terutama di kalangan minoritas Vietnam terus ada. Jenis kemiskinan baru mulai terbentuk. Sama halnya seperti di negara-negara berkembang lainnya, Vietnam mengalami kemajuan ekonomi, namun jarak antara yang kaya dan miskin juga kian nampak.

Kemiskinan di Vietnam

Vietnam telah mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selama tiga dekade terakhir. Pertumbuhan terjadi dari pendapatan per kapita sekitar \$100 pada tahun 1980-an, Vietnam telah berhasil meliberalisasi dan mencapai pendapatan per kapita sebesar \$2.300 pada tahun 2019 (Quyen, 2019:1). Terlepas dari itu, pengentasan kemiskinan tetap menjadi masalah di Vietnam. Vietnam menjadi negara terpadat ke-13 dengan lebih dari 95 juta orang, 9,8 persen penduduk hidup dalam kemiskinan, berarti ada sekitar 9 juta orang yang termasuk dalam kategori

miskin. Jumlah ini melebihi jumlah penduduk beberapa negara seperti Libya, Israel, dan Laos.

Ada beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Vietnam diantaranya adalah dengan meningkatkan pangsa sektor industri pertanian, membuka lowongan pekerjaan secara lebih luas, restrukturisasi dari sektor pertanian ke sektor industri, meningkatkan mutu pendidikan masyarakat (Pham dkk, 2019:7). Pembangunan sektor pertanian merupakan usaha yang baik untuk pengentasan kemiskinan dibandingkan sektor lain seperti sektor jasa. Lapangan kerja juga merupakan solusi langsung yang paling efektif untuk pengentasan kemiskinan di Vietnam. Restrukturisasi dari sektor pertanian ke sektor industri bisa mempercepat urbanisasi, peningkatan urbanisasi secara efektif akan mengurangi kemiskinan industrialisasi yang pesat dilakukan di sektor pertanian. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan baik, salah satunya bisa dilakukan dengan menetapkan tujuan pendidikan sebagai prioritas utama bagi masyarakat miskin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengentasan kemiskinan individu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah solusi paling efektif dalam jangka panjang untuk tujuan pengentasan kemiskinan di Vietnam.

Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mendorong warga Vietnam untuk bekerja di Jepang. Meski bukan satu-satunya solusi, namun bekerja di luar negeri merupakan hal yang terbilang mudah dan cepat untuk meningkatkan kesejahteraan. Menurut data pada tahun 2005 Vietnam mengirimkan 70.000 hingga 80.000 tenaga kerja (Belanger, 2013: 37). Dari data tersebut, 90 persen dari pekerja ini ditempatkan di Asia Timur dan Tenggara dengan negara tujuan utama Malaysia, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang.

Dalam kasus meningkatnya kriminalitas yang dilakukan oleh pendatang Vietnam, hal itu tidak bisa terlepas dari banyaknya pendatang Vietnam yang menetap di Jepang. Hal itu karena semakin banyaknya perusahaan Jepang di Vietnam, pandangan para orang tua mengenai kesejahteraan pun mulai naik. Orang tua di Vietnam memandang

perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang dapat membawa perubahan sosial ekonomi bagi mereka dan juga anak-anak mereka nantinya. Sehingga banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya untuk belajar atau menjadi peserta pelatihan di Jepang (Vnexpress, 2017). Hal ini dilihat dari perspektif disorganisasi sosial, salah satunya tentang disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga ada di bawah pengaruh nilai-nilai baru, baru untuk suatu subjek, seperti sumber-sumber baru dari kepuasan hedonistik. Nilai-nilai batil baru, jenis organisasi ekonomi baru yang individualistis, dan bentuk baru dari daya tarik seksual. Dalam kasus ini, Karena adanya harapan yang tinggi atas kehidupan yang layak jika dilihat dari sumber-sumber baru dari kepuasan hedonistik, menyebabkan orang tua banyak yang memaksakan anaknya untuk sekolah atau menjadi peserta pelatihan di Jepang. Biaya untuk sekolah ataupun pelatihan untuk bisa ke Jepang tidak murah, untuk itu tidak sedikit para orang tua berhutang untuk biaya pendaftaran sekolah atau pelatihan anaknya. Keinginan para orang tua di Vietnam untuk melakukan mobilitas antar-generasi, yaitu mengacu pada perbedaan status yang dicapai seseorang dengan status orang tuanya (Sunarto, 2004) dapat menyebabkan disorganisasi dalam keluarga. Ketika orang tua menaruh harapan dengan menyekolahkan atau menjadikan anak mereka sebagai peserta pelatihan di Jepang sehingga kemudian mereka bisa bekerja di perusahaan Jepang dengan gaji dan prestise yang tinggi sehingga terjadi mobilitas antar-generasi. Dalam disorganisasi keluarga kita kenal pula istilah “*i attitude dan we attitude*” yang diungkapkan oleh Thomas dan Znaniecki (Rubington,1989). *We attitude* adalah situasi pada masyarakat tradisional mengisyaratkan orang-orang untuk fokus dengan apa yang terbaik untuk grupnya. *Sedangkan i attitude* adalah sikap di mana lebih mementingkan kepentingan sendiri di atas kelompok. Dalam kasus ini beberapa orang tua lebih mementingkan *we attitude*, di mana harapan orang tua untuk keluar dari kemiskinan atau kondisi mereka saat ini dan melakukan mobilitas antar-generasi. Adanya perbedaan gaya hidup dan budaya antara Jepang dan Vietnam tentu bisa memunculkan berbagai masalah. Hal ini bisa memungkinkan terjadinya kekosongan norma dan konflik budaya.

Peserta pelatihan dan mahasiswa yang mendapat beasiswa atau yang berasal dari keluarga mampu, tentu tidak akan dihadapkan dengan masalah keuangan. Namun, tidak sedikit peserta yang pergi ke Jepang dengan berhutang untuk memenuhi harapan akan kehidupan yang mapan tersebut. Mereka berharap untuk keluar dari keadaan mereka yang sekarang, dan menuju ke arah yang lebih baik dan mapan. Seperti yang dikemukakan Leisering dan Leibfried (Giddens, 2009), "*many families that move out of poverty also have a higher risk of re-entering the category later, during periods of economic change*". Keluar dari kemiskinan dapat ditempuh dengan segala macam usaha termasuk sekolah dan menjadi peserta pelatihan di luar negeri termasuk Jepang. Namun seperti pada konsep yang disampaikan Giddens, keluar dari kemiskinan memiliki resiko tinggi untuk masuk kembali dalam kemiskinan selama periode perubahan ekonomi. Keluar dari kemiskinan membutuhkan usaha dan cara yang benar, serta kesabaran dalam mengusahakannya. Dalam keadaan memiliki ambisi yang kuat, orang-orang cenderung menggunakan segala macam cara dalam mencapai tujuan, termasuk keluar dari kemiskinan. Ketika cara yang ditempuh salah, maka akan dapat membawa individu tersebut ke dalam dunia kriminal. Seperti halnya pendatang di Vietnam, ketika ambisi mereka untuk hidup dengan taraf yang lebih baik membawa mereka menimba ilmu ke Jepang, dalam prosesnya di Jepang pun mereka bertemu dengan berbagai masalah salah satunya ekonomi. Untuk keluar dari masalah ekonomi di Jepang, beberapa pendatang Vietnam yang menjadi pelaku tindak kriminal lebih memilih untuk melakukan kriminalitas karena ambisi untuk keluar dari kemiskinan tersebut.

Daya Tarik Jepang Terhadap Warga Vietnam

Jepang saat ini tengah bersaing dengan China dalam berbagai sektor, salah satunya sektor pendidikan. Bertujuan untuk meningkatkan daya saing pendidikan tinggi, Jepang berusaha menyediakan lingkungan internasional di kampus bagi para mahasiswanya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Olahraga dan Sains dan Teknologi Jepang (MEXT) telah meluncurkan Program Global 30 pada tahun 2009 untuk mendorong pendaftaran siswa internasional ke beberapa universitas terpilih di Jepang

(Shazlinda dan Noriyuki, 2012). Program ini diharapkan dapat menarik 300.000 mahasiswa internasional dalam waktu 5 tahun, atau meningkat 300 persen dari jumlah sebelum peluncuran. Jepang sedang giat menarik para pelajar asing untuk belajar di Jepang. Hal itu dilakukan Jepang dengan harapan mereka bisa membantu meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara asal mereka di masa depan. Salah satu negara yang mahasiswanya banyak belajar di Jepang adalah Vietnam, jumlah warga Vietnam yang belajar di Jepang termasuk sekolah bahasa naik sebanyak 12 kali lipat antara tahun 2010 sampai 2016, yaitu hampir mencapai 54.000 orang, jumlah ini berdasarkan dari data Japan Student Service Organization (Bloomberg, 2017).

Selain pendidikan Vietnam juga banyak mengirim para warganya ke Jepang dengan program pemagangan. Salah satunya adalah program pelatihan praktek kerja (*The Technical Intern Training Program*), sistem ini diperkenalkan pada tahun 1993 dengan tujuan mentransfer keterampilan di sektor industri, pertanian dan perikanan ke negara berkembang. Sekarang, sejak 1 November, perusahaan yang menyediakan layanan perawatan juga dapat menerima peserta pelatihan dan periode pelatihan maksimum telah diperluas dari tiga tahun menjadi lima tahun (Japan Times, 2017). Berdasarkan data dari Kementerian Imigrasi Jepang, pada tahun 2017 jumpah pemegang dari Vietnam sebesar 26.437 orang, Pemegang Vietnam menjadi pemegang dengan jumlah terbanyak di Jepang (Nippon, 2017).

Para peserta pelatihan menghadapi berbagai masalah. Menurut kementerian tenaga kerja, tercatat 4.004 pengusaha dalam program ini melanggar undang-undang ketenagakerjaan pada tahun 2016, yang terbesar sejak 2003. Pelanggaran peraturan jam kerja menyumbang 24% dari total, diikuti oleh kegagalan untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan sebesar 19% dan tidak membayar lembur sebesar 14%. Empat puluh kasus pelanggaran hukum tenaga kerja berbahaya dirujuk ke jaksa. Banyak peserta pelatihan dilaporkan mengalami pelecehan di tempat kerja dan penindasan, dan kesulitan mendapatkan kompensasi untuk cedera dan penyakit terkait pekerjaan. Ada kritik bahwa beberapa orang dikenai kondisi kerja yang dekat dengan kerja paksa. Para peserta pelatihan tidak

diperbolehkan untuk mengubah pekerjaan secara bebas bahkan ketika mereka tidak puas dengan majikan mereka.

Perspektif disorganisasi sosial adalah sebuah pandangan yang menganggap masyarakat menjadi terorganisasi selain dikarenakan adanya keserasian hubungan antar bagian, juga didukung oleh seperangkat pengharapan atau tujuan dan seperangkat aturan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa konsep sentral dari *social disorganization* adalah *social rules*. Dalam kehidupan masyarakat, *social rules* di satu pihak berguna untuk mewujudkan koordinasi diantara bagian-bagian yang berbeda dan di sisi lain juga berfungsi mengatur perilaku masyarakat. Kondisi dimana *social rules* kurang atau tidak berfungsinya mengakibatkan berkurangnya kekuatan ikatan, baik bagi koordinasi antar bagian maupun dalam melakukan kontrol terhadap perilaku individu. Kenyataan inilah yang mendorong terjadinya diorganisasi sosial. Seperti dalam kasus banyaknya masalah yang dihadapi para pekerja Vietnam di Jepang, hal itu dikarenakan karena kurang berfungsinya kontrol dari pemerintah Jepang maupun kedutaan Vietnam di Jepang yang kurang mengawasi sistem dalam perusahaan Jepang yang sering merugikan para pekerja asing seperti Vietnam. Dalam kasus ini juga ada ketidak serasian antar kelompok yang mengawasi pekerjaan para pekerja asing. Selain itu juga ada ketidak sesuaian antara harapan para pekerja yang ingin mendapatkan gaji tinggi yang bisa menunjang kehidupannya, namun pada kenyataannya mereka mendapat ketidakadilan seperti gaji yang sedikit dan lembur tanpa gaji.

Masalah-masalah yang ada bisa memunculkan tekanan terhadap para pendatang Vietnam di Jepang. Selain menjadi korban para pendatang Vietnam tidak jarang yang menjadi pelaku kejahatan. Kejahatan yang dilakukan biasanya hanya kejahatan kecil seperti mengambil barang jualan di toko atau menyelinap di rumah orang. Kejahatan-kejahatan tersebut biasanya biasanya dilakukan karena adanya berbagai tekanan yang dialami karena adanya perbedaan budaya maupun sosial antara di Jepang dan Vietnam.

Perbedaan Sosial Budaya

Tiap negara tentu memiliki perbedaan-perbedaan, adanya perbedaan ini mengharuskan adaptasi bagi individu yang ingin berpindah atau bepergian ke suatu daerah. Tidak semua anggota masyarakat akan mudah beradaptasi dengan kondisi yang baru. Sebagian masyarakat sulit menerima adanya perbedaan atau perubahan. Oleh karena itu, situasi dalam masyarakat bisa mengarah kepada suasana yang tidak menentu atau tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama. Kondisi semacam ini mengarah pada gejala disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial adalah gejala lepasnya keterikatan tatanan sosial yang pernah melembaga dari seorang individu. Fenomena ini terjadi sebagai dampak perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat atau sistem sosial. Misalnya, pergeseran tata kehidupan dari sistem rural (pedesaan) ke sistem urban (perkotaan). Salah satunya adanya perubahan pola perilaku masyarakat pedesaan yang gotong-royong, kuatnya keterikatan norma-norma dan sejumlah nilai-nilai yang melembaga (ciri kehidupan pedesaan) menjadi pola masyarakat yang individualistis dan pengaturan hubungan berdasarkan kompetisi individual yang lebih rasional (ciri kehidupan perkotaan).

Jepang dengan kekuatan ekonomi yang kuat, dan teknologi maju menjadi daya tarik warga asing untuk mencoba peruntungan dalam mencari uang atau bekerja maupun dalam mencari ilmu. Namun karena perbedaan budaya tentu akan membawa berbagai masalah untuk warga asing atau pendatang, salah satunya masalah ekonomi. Banyak warga asing yang tidak bisa mengelola ekonomi mereka saat tinggal di Jepang. Banyak para pendatang yang kekurangan ekonomi akan melakukan beberapa pelanggaran yang bisa dikategorikan menjadi kriminal, kejahatan tersebut dilakukan oleh warga dari berbagai negara, salah satunya Vietnam.

Vietnam sebagai negara berkembang jika dibandingkan dengan Jepang sebagai negara maju, tentu akan memiliki banyak perbedaan, perbedaan itu bisa memunculkan masalah-masalah apabila seorang warga Vietnam tinggal di Jepang. Seperti dalam hal ekonomi, seperti yang diketahui, sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang kuat, tentunya

tingkat persaingan juga keras. Persaingan kerja yang keras tersebut menjadi hambatan untuk para pekerja asing, terutama dari negara berkembang seperti Vietnam yang persaingan kerjanya relatif ringan dibanding Jepang, yaitu 48 jam per minggu. Sebagai contoh jumlah jam kerja di Jepang dikenal sangat tinggi, yaitu ada yang mencapai 100 jam dalam sebulan, yang akhirnya dapat menyebabkan *karoshi* atau meninggal karena kelelahan bekerja.

Dalam sudut pandang disorganisasi sosial, kita sedang hidup dalam periode individualisasi. Segalanya sedang dalam pergolakan dan semua terasa berubah. Terutama dalam masyarakat, di Vietnam sendiri ekonomi mulai lebih maju dengan banyaknya perusahaan multinasional, di Jepang sendiri masyarakatnya terkenal dengan *aging society*, di mana orang tua lebih banyak dari anak muda. Di mana semua juga sudah lebih praktis dengan kecanggihan teknologi. Kebiasaan dapat dibentuk hanya dalam lingkungan yang relatif stabil. Jika kestabilan itu berubah, bentuk kebiasaan pun dapat senantiasa berubah. Segala perubahan yang terjadi secara rutin, dapat merubah suatu kebiasaan. Segala alat yang baru dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan dan keteraturan sosial yang selanjutnya dapat memberikan pengaruh terhadap disorganisasi sosial. Jepang sebagai negara yang jauh berbeda dengan Vietnam dapat memberikan pengaruh disorganisasi sosial pada pendatang Vietnam. Pendatang Vietnam harus beradaptasi kembali dengan rutinitas, alat, dan cara sosialisasi baru di Jepang. Ketika kebiasaan yang dianggap baik di Vietnam secara norma harus beradaptasi dengan norma-norma baru di Jepang, dan pendatang tersebut mengalami kegagalan dalam adaptasinya dengan norma dan kebiasaan baru, maka dapat muncul suatu disorganisasi yang dapat mengarahkan mereka ke dalam dunia kriminal.

Untuk kasus pelajar Vietnam, banyak dari mereka yang belajar di Jepang karena ingin bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Vietnam. Para orang tua yang menyekolahkan anaknya di Jepang berharap saat anak mereka kembali, mereka bisa bekerja di perusahaan Jepang dengan gaji besar. Namun karena gaya hidup yang berbeda antara Vietnam dan Jepang, pada saat pelajar Vietnam studi di Jepang mereka akan menemui banyak

permasalahan, seperti masalah ekonomi dan gaya hidup. Bagi mahasiswa atau pekerja asing untuk menetap sementara atau selamanya di suatu negara tertentu tentu akan menimbulkan sifat konsumtif walau hanya sedikit. Tinggal di suatu negara baru dengan berbagai hal yang baru bisa membuat seseorang menjadi impulsif dalam berbelanja, yang akan membuat para pendatang sulit untuk mengatur keuangan walau dikatakan mereka hidup dalam posisi di mana harus berhemat. Dalam perspektif disorganisasi sosial, Ogburn menyatakan bahwa perubahan kebiasaan dan norma cenderung lebih lama dari teknologi, (Rubington dan Weinber, 1988). Dalam kasus pendatang dari Vietnam ini terjadi ketertinggalan kebudayaan di sini. Di mana Jepang dan Vietnam memiliki perbedaan dalam penggunaan teknologi yang cukup tinggi, sehingga hal-hal yang biasanya tidak ingin dilakukan di Vietnam, menjadi terpaksa harus dilakukan di Jepang. Seperti mengutil dan mencuri yang dilakukan pendatang dari Vietnam

Terlilit hutang tentu saja bisa menjadi faktor bagi individu untuk melakukan tindak kriminal. Seorang individu yang tinggal di negara asing biasanya akan sangat rentan terhadap masalah ekonomi. Jepang yang terkenal dengan *arubaito* (bekerja paruh waktu) yang seharusnya dapat memenuhi keuangan seorang pendatang terutama pelajar dan peserta pelatihan di Jepang. Hal ini membuktikan bahwa konsep kemiskinan dari ketika seseorang ingin keluar dari kemiskinan dengan cara yang tidak matang, ia akan kembali dihadapkan dengan masalah kemiskinan tersebut. Meningkatnya kasus kejahatan yang dilakukan pendatang Vietnam di Jepang menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak. Seperti yang dijelaskan di atas, kasus ini muncul karena adanya disorganisasi sosial maupun keluarga, dan juga perbedaan kehidupan sosial. Perlu dilakukan upaya penyelesaian yang menyeluruh oleh internal keluarga, hingga pemerintahan kedua negara Vietnam dan Jepang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa penulis yang sudah dijabarkan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh pendatang Vietnam adalah sejajar dengan

bertambahnya populasi pendatang Vietnam di Jepang. Bertambahnya populasi pendatang Vietnam di Jepang diakibatkan oleh kemiskinan, selain itu juga karena meningkatnya jumlah perusahaan Jepang yang berinvestasi di Vietnam. Ekonomi di Vietnam mulai maju karena banyaknya perusahaan multinasional di Vietnam terutama Jepang. Orang tua-orang tua di Vietnam menaruh harapan tinggi pada perusahaan tersebut. Dikarenakan harapan itu, banyak dari para orang tua yang menyekolahkan anaknya atau menjadikan anaknya sebagai peserta pelatihan di Jepang. Biaya yang dikeluarkan untuk hal itu tidaklah sedikit. Keinginan yang kuat untuk melakukan mobilitas antar-generasi membuat seseorang rela mengorbankan hal penting lainnya. Seperti berhutang, jual tanah, dan lain sebagainya. Kadang karena keinginan keras dari orang tua yang tidak diimbangi dengan kematangan mental anak. Hidup di negara lain yang lebih maju dapat menimbulkan perilaku hedonisme.

Keluar dari kemiskinan dapat ditempuh dengan segala macam usaha termasuk sekolah dan menjadi peserta pelatihan di luar negeri termasuk Jepang. Namun seperti pada konsep yang disampaikan Giddens, keluar dari kemiskinan memiliki resiko tinggi untuk masuk kembali dalam kemiskinan selama periode perubahan ekonomi. Seperti halnya pendatang di Vietnam, ketika ambisi mereka untuk hidup dengan taraf yang lebih baik membawa mereka menimba ilmu ke Jepang, dalam prosesnya di Jepang pun mereka bertemu dengan berbagai masalah salah satunya ekonomi. Untuk keluar dari masalah ekonomi di Jepang, beberapa pendatang Vietnam yang menjadi pelaku tindak kriminal lebih memilih untuk melakukan kriminalitas karena ambisi untuk keluar dari kemiskinan tersebut.

Perbedaan norma, ekonomi, dan sosial budaya yang tinggi antara Vietnam dan Jepang juga menyebabkan terjadinya disorganisasi sosial. Segala alat yang baru dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan dan keteraturan sosial yang selanjutnya dapat menyebabkan *cultural lag* dan memberikan pengaruh terhadap disorganisasi sosial. Jepang sebagai negara yang jauh berbeda dengan Vietnam dapat memberikan pengaruh disorganisasi sosial pada pendatang Vietnam. Pendatang Vietnam harus beradaptasi kembali dengan rutinitas, alat, dan cara sosialisasi baru di

Jepang. Ketika kebiasaan yang dianggap baik di Vietnam secara norma harus beradaptasi dengan norma-norma baru di Jepang, dan pendatang tersebut mengalami kegagalan dalam adaptasinya dengan norma dan kebiasaan baru, maka dapat muncul suatu disorganisasi yang dapat mengarahkan mereka ke dalam dunia kriminal. Norma dan kebiasaan baik yang biasa diterapkan di Vietnam perlahan-lahan mulai ditinggalkan karena adanya alat-alat baru yang diterima di Jepang. Ketika alat-alat baru tersebut dikonstruksikan dengan buruk dan ditambah dengan masalah ekonomi, maka dapat menjadi pemicu dilakukannya tindakan kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Mantra Ida. 1985. *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Nur Cahya.
- Belanger, Daniele. Ueno, Kayoko. Hong, Khuat Thu. Ochiai, Emiko. 2011. From Foreign Trainees to Unauthorized Workers: Vietnamese Migrant Workers in Japan. *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 20, No.1, 2011
- Belanger, Daniele. Wang, Hong Zen. 2013. Becoming a Migrant: Vietnamese Emigration to East Asia. *Pacific Affairs: Volume 85*, No. 4 – December 2012
- Fujioka, Toru. 2018. Crime in Japan Falls to Lowest Level in More Than 70 Years. Diakses pada 2 Mei 2018, dari <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-21/crime-hits-postwar-low-in-japan-as-joblessness-declines>
- Giddens, Anthony. 2009. *Sociology 6th edition*. UK: Polity Press
- Jung, Hoyong. 2023. Effects of foreign residents on crime: Evidence from South Korea. *International Journal of Law, Crime and Justice* 73 (2023) 100594
- Kyodo News. 2018. Vietnam Ranks Top For 1st Time in No. of Expat Crime in Japan. Diakses pada 2 Mei 2018, dari <https://english.kyodonews.net/news/2018/04/b6c936cf3dbb-vietnam-ranks-top-for-1st-time-in-no-of-expat-crimes-in-japan.html>

- Leiva, Mauricio. Lavin, Felipe Vasques. Oliva, Roberto D. Ponce. 2020. Do Immigrants Increase Crime? Spatial Analysis in a Middle-Income Country. *World Development* 126 (2020) 104728
- Montbleau, Ryan. 2017. *Poverty in Vietnam*. (2018, 10 Mei) <https://borgenproject.org/state-of-poverty-in-vietnam/>
- Naoko, Sunai. 2020. Runaway and Resistance against and within Migration Infrastructures: The cases of Vietnamese migrant workers in Japan and Taiwan. *Kyoto University: Proceedings of the 13th Next Generation Global Workshop (2020)*, 2020: 1-35.
- Nga, Minh. 2018. Vietnamese Population in Japan Quadruples Over five Years: report. Diakses pada 2 Mei 2018, dari <https://e.vnexpress.net/news/news/vietnamese-population-in-japan-quadruples-over-five-years-report-3719837.html>
- Nohara, Yoshiaki, dan Uyen, Nguyen Dieu Tu. 2017. Vietnamese Students Are Pouring Into Japan. (2018, 10 Mei) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-24/japan-opens-new-front-in-race-for-booming-southeast-asia-markets>
- Osac. 2017. Japan 2017 Crime & Safety Report. Diakses pada 2 Mei 2018, dari <https://www.osac.gov/Pages/ContentReportDetails.aspx?cid=21160>
- Pham, Thu Hang. Riedel, James. 2019. Impacts of the Sectoral Composition of Growth on Poverty Reduction In Vietnam. *Journal of Economics and Development* Vol. 21 No. 2, 2019.
- Quyen, Ngo Ha. 2019. Reducing rural poverty in Vietnam: issues, policies, challenges. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Inclusive Social Development: Expert Group Meeting on Eradicating Rural Poverty to Implement the 2030 Agenda for Sustainable Development.
- Rahman, Hamzah Abdul. 2012. Negative Impact Induced by Foreign Workers: Evidence in Malaysian Construction Sector. *Habitat International* 36 (2012) 433e443
- Rubington, Earl, dan Weinberg, Martin S. 1989. *The Study of Social Problems Fourth Edition*. Oxford: Oxford University Press

- Ruswanto, Wawan (2014) *Pengertian Perubahan dan Disorganisasi Sosial*. In: *Pengertian Perubahan dan Disorganisasi Sosial*. Universitas Terbuka, Jakarta
- Schreiber, Mark. 2018. The Face of Immigration is Rapidly Changing in Japan. Diakses pada 2 Mei 2018, dari <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/02/17/national/media-national/face-immigration-rapidly-changing-japan/#.Wul8NYjFLIU>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Susilo, Ricard. 2018. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Jepang Mencapai 1.27 Juta Jiwa Paling Banyak Orang China. (2018, 19 Februari). <http://www.tribunnews.com/internasional/2018/01/27/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-jepang-mencapai-127-juta-jiwa-paling-banyak-orang-china>
- The Japan Times. 2017. Revamped Foreign Trainee System. (2018, 10 Mei) <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/11/11/editorials/revamped-foreign-trainee-system/#.WvPebYjRDIU>
- Tomiyama, Atsushi. 2017. Japan returns as top investor in Vietnam. (2018, 10 Mei) <https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-returns-as-top-investor-in-Vietnam>
- VnExpress. 2017. Vietnamese Student Turn to Japan in Hope of Getting Jobs. Diakses pada 2 Mei 2018, dari <https://e.vnexpress.net/news/business/economy/vietnamese-students-turn-to-japan-in-hope-of-getting-good-jobs-3590112.html>
- VnExpress. 2018. Vietnamese Crime Rate In Japan Stands At All-Time High: Report. Diakses pada 25 Juli 2023, dari <https://e.vnexpress.net/news/news/vietnamese-crime-rate-in-japan-stands-at-all-time-high-report-3736186.html>
- Yusof, Shazlinda Md dan Shutto, Noriyuki. 2012. *The Development of Halal Food Market in Japan: An Exploratory Study*.